

LAPORAN PENELITIAN INSTITUSIONAL PPs UNY
TAHUN ANGGARAN 2019



Judul:
RELEVANSI KURIKULUM PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh

Dr. Sunarso, M.Si./ NIP 19600521 198702 1 004
Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag./NIP. 19720619 200212 1 001
Dr. Suharno, M.Si./NIP. 19680417 200003 1 001
Deviana Fadhillatie Azizah/ NIM. 18730251022
Zain Nugroho/NIM. 18730251038

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2019

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN INSTITUSIONAL 2019

1. Judul Penelitian : RELEVANSI KURIKULUM PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama lengkap : Dr. Sunarso, M.Si.
- b. Jabatan : Lektor Kepala
- c. Program Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan - S2
- d. Alamat : Mlandangan RT33 RW12 Minomartani
- e. Telepon : +628164220819
- f. e-mail : sunarso@uny.ac.id
3. Bidang Keilmuan : Pendidikan
4. Skim : Penelitian Institusional 2019
5. Tema Penelitian : Kurikulum pendidikan akademik, vokasi dan profesi Payung
6. Sub Tema Penelitian : Pendidikan Berkarakter dan berdaya saing Payung
7. Kelompok Peneliti :

No	Nama, Gelar	NIP	Bidang Keahlian
1.	Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.	19720619 200212 1 001	Pendidikan Kewarganegaraan
2.	Dr. Suharno, M.Si.	19680417 200003 1 001	Kebijakan Publik

8. Mahasiswa yang terlibat :

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Deviana Fadhillatie Azizah	18730251022	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
2.	Zain Nugroho	18730251038	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan

9. Lokasi Penelitian : YOGYAKARTA
10. Waktu Penelitian : 11 Maret 2019 s/d 31 Oktober 2019
11. Dana yang diusulkan : Rp. 20.000.000,00

Mengetahui,
Kaprodi PPKn,

Yogyakarta, 31 Oktober 2019
Ketua Pelaksana

Dr. Suharno, M.Si.
NIP 19680417 200003 1 001

Dr. Sunarso, M.Si.
NIP 19600521 198702 1 004

Menyetujui,
Direktur PPs,

Prof. Dr. Marsigit, M.A.
NIP 19550415 198502 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memetakan relevansi kebutuhan Kurikulum Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di program pascasarjana di perguruan tinggi di Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0; (2) memetakan pengembangan kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi di Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0; (2) mengkonstruksi Kurikulum Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di program pascasarjana memasuki era revolusi industri 4.0.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap relevansi kurikulum program pascasarjana penyelenggara Program Studi PKn/PPKn di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik diskusi kelompok terpumpun (FGD) dan dokumentasi. Subjek penelitian terhadap dokumen ditentukan secara purposif terhadap dokumen kurikulum Program Studi PPKn yang dibuat oleh sejumlah program studi PPKn Pascasarjana se-Indonesia, dengan mengambil sampel Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Padang dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. FGD dilakukan untuk mengonstruksi relevansi Kurikulum S2 Program Studi PPKn UNY dengan kebutuhan era indsutri 4.0. Analisis data dilakukan secara induktif, dan disajikan secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, memasuki era revolusi industri 4.0 Kurikulum PPKn di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Indonesia memiliki kesamaan nomenklatur kajian yang dominan menekankan aspek kewarganegaraan dibandingkan kajian Pancasila sebagai *core subjects* dalam sejumlah nomenklatur matakuliahnya, meskipun dalam kajian pokok dan profil lulusan yang dihasilkan hendak secara utuh menampilkan kompetensi lulusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Kedua*, berdasarkan hasil studi komparatif dengan berbagai prodi S2 PPKn yang menjadi sampel penelitian dan FGD dengan *stakeholder* maka dipetakan pengembangan kompetensi lulusan PPKn di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Indonesia era revolusi industri 4.0, yang menempatkan kajian Pancasila dan Kewarganegaraan dalam porsi dan posisi yang memadai.

Kata Pengantar

Penelitian institusional ini merupakan program kegiatan yang diagendakan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun anggaran 2019. Penelitian ini bertujuan (1) memetakan relevansi kebutuhan Kurikulum Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di program pascasarjana di perguruan tinggi di Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0; (2) memetakan pengembangan kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi di Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0; (2) mengkonstruksi Kurikulum Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di program pascasarjana memasuki era revolusi industri 4.0.

Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa uluran tangan dan bantuan berbagai pihak. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, tim reviewer proposal dan narasumber seminar hasil penelitian, serta pihak-pihak yang tak bisa disebut satu per satu namanya.

Penelitian ini pasti memiliki keterbatasan. Untuk itu, pengembangan dan perbaikan dalam penelitian berikutnya, semoga menjadikan topik penelitian ini terus disempurnakan hasil-hasilnya. Dengan demikian penelitian ini diharapkan berguna untuk penguatan kapasitas lembaga dan segenap civitas akademiknya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2019

Tim Peneliti

Daftar Isi

Lembar pengesahan	- ii
Abstrak	- iii
Kata Pengantar	- iv
Daftar Isi	- v
Daftar Tabel	- vi
Bab I Pendahuluan	- 1
Bab II Kajian Pustaka	- 4
Bab III Metode Penelitian	- 8
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	- 10
Bab V Penutup	- 29
Daftar Pustaka	- 30
Lampiran	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Peringkat Akreditasi Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia – 11
- Tabel 2. Struktur Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Saat Usulan Pembukaan Prodi -23
- Tabel 3 Revisi Struktur Kurikulum Pasca Ijin Pembukaan Prodi S2 PPKn PPs UNY – 24
- Tabel 4. Pengembangan Kurikulum Mengacu kepada Tuntutan Revolusi Industri 4.0 - 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era revolusi industri 4.0 yang kini melanda di segenap kehidupan masyarakat modern ditandai oleh melimpahnya informasi sehingga perlu kemampuan mengolah dan memanfaatkannya dalam ruang publik. Dengan demikian, perlu kecerdasan masyarakat warga (civil society) (Samsuri, 2011) terhadap melimpahnya arus informasi dengan ditandai sejumlah kompetensi literasi kewargaan (civic literacy) guna mengantisipasi dampak buruk disrupsi informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di level perguruan tinggi, perubahan kebijakan pendidikan nasional seiring dengan dinamika politik nasional ditanggapi secara akademik melalui maraknya kajian pendidikan kewarganegaraan di tingkat program magister dan doktor. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dianggap telah memelopori kajian pendidikan kewarganegaraan di level program pascasarjana mulai tahun akademik 2005 untuk jenjang magister dan program doktor semenjak tahun akademik 2008 dengan nomenklatur Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Seiring waktu, bermunculan pula prodi-prodi baru di jenjang magister di sejumlah Program Pascasarjana dengan nomenklatur Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) semenjak tahun akademik 2014.

Memasuki dekade kedua abad ke-21 kehadiran prodi-prodi PPKn di level pascasarjana menghadapi sejumlah tantangan. Secara kelembagaan keilmuan, penamaan “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” meneguhkan asumsi bahwa program pendidikan kewarganegaraan di Indonesia khususnya di level pendidikan magister berwatak Pancasila. Untuk itu, pencapaian kompetensi lulusan program magister pun agar memasukkan sejumlah kajian tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara ke dalam kurikulumnya (Samsuri, Suharno, dan Murdiono, 2019).

Secara eksternal, lulusan dituntut harus memiliki pengetahuan akademik yang handal dan keterampilan yang adaptif dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0. Agar terpenuhi tuntutan tersebut, maka secara kurikuler program magister PPKn

seyogianya memperkuat keilmuan dan fondasi kajian akademik dengan penguatan epistemik kajian Pancasila sebagai karakteristik pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, kurikulum program magister PPKn perlu menyiapkan dan menyelenggarakan aktualisasi kajian Pancasila yang dipadupadankan dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0.

Persoalannya, dari tujuh prodi magister penyelenggara program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara spesifik menggunakan PPKn seluruh Indonesia hanya enam perguruan tinggi. Keenam perguruan tinggi tersebut: STKIP Arrahmaniyah Depok, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Pendidikan Indonesia secara “eksklusif” menamai prodinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan saja. Di antara perbedaan nomenklatur prodi tersebut, adakah perbedaan substansial baik dari aspek kajian akademik maupun kebutuhan era industri 4.0? Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengkaji relevansi kurikulum program magister PPKn era industri 4.0.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut di muka, maka penelitian hendak menjawab permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peta kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan era revolusi industri 4.0 yang dikembangkan dalam kurikulum program magister di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengembangan kurikulum program magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta agar relevan dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) memetakan relevansi kebutuhan Kurikulum Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di program pascasarjana di perguruan tinggi di Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0;

(2) mengkonstruksi Kurikulum Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta yang relevan dengan era revolusi industri 4.0.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kualifikasi Program Magister

Kerangka Kualifikasi Nasional Program Magister Profil lulusan tiap-tiap jenjang pendidikan mensyaratkan kompetensi atau kemampuan secara utuh yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi tersebut merupakan suatu keutuhan di mana satu dan lainnya harus dipenuhi oleh setiap lulusan. Di bagian lain, kualifikasi perolehan suatu kompetensi merupakan ciri pembeda terhadap level pencapaian hasil belajar dan proses pembelajaran di tiap-tiap tingkatan jenjang pendidikan. Profil lulusan itu sendiri di Indonesia menjadi indikator kualifikasi kerja nasional Indonesia (Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yakni sebagai “bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.” Profil lulusan program magister mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) termasuk pada level 8. Pada level ini sedikitnya memiliki tiga indikator sebagai berikut.

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional (Lampiran. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Pada bagian lain, penyelenggaraan program magister seyogianya juga menyiapkan lulusan sejumlah kemampuan. Kemampuan tersebut meliputi: (a) keterampilan menyelesaikan dalam pekerjaan/kompetensi; (b) cakupan keilmuan/pengetahuan yang dikuasai; (c) metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan yang telah dikuasai tersebut; dan (d) kemampuan manajerial” (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010/2011:24). Dengan demikian, penyelenggaraan program magister agar melahirkan profil lulusan dengan sejumlah kompetensi sesuai kualifikasi lulusan yang diidealkan. Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan Program studi PKn/PPKn di level program magister dan doktor sejatinya memiliki visi sebagai *nation and character building*. Visi ini di Indonesia dikenal sebagai upaya meng-Indonesia-kan orang Indonesia. Meskipun secara formal seseorang sebagai warga negara Indonesia (WNI), namun karakternya sebagai bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan, salah satunya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hadir untuk mendidik kebangsaan warga negara sebagai pendidikan kebangsaan yang sangat progresif, karena dalam pengembangan karakter kebangsaan tidak hanya sebatas *cultural nation* tetapi juga sebagai *political nation*.

B. Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Secara yuridis, Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 hanya menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan, setelah sebelumnya dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 disebut pula Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Penamaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 sejalan dengan pemikiran akademis, bahwa PPKn semestinya memuat nilai-nilai dasar sebagai prasyarat kehidupan bersama yang dicita-citakan (*great ought*), yang meliputi ideologi, sistem pemerintahan sendiri, hak asasi manusia, dan *common grounds* berupa kebaikan bersama yang diakui bersama termasuk adat istiadat.

Arti penting PPKn tersebut membutuhkan tenaga pendidik kompeten dan handal sehingga dapat mengaktualisasikan visi, misi, dan tujuannya untuk membentuk warga negara Indonesia yang ideal, sebagaimana dimaksudkan dalam pembangunan pendidikan nasional itu sendiri. Ketersediaan tenaga pendidik Pendidikan Kewarganegaraan yang kompeten dan handal hanya dapat dicapai dengan ketersediaan institusi pendidikan yang memadai pula.

Secara formal, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pendidikan dasar (SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/MAK) mensyaratkan lulusannya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007. Demikian pula, untuk dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dan dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi memerlukan kualifikasi akademik

dan kompetensi profesional yang memadai dengan cara menempuh studi lanjutan di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi.

Keterbatasan jumlah lembaga studi lanjutan pascasarjana yang linier dengan tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi keahlian guru/dosen Pendidikan Kewarganegaraan, menyebabkan pemilihan program studi terdekat di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi menjadi jalan keluar yang dipilih, seperti di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) PPs UNY, dan Prodi Pendidikan Dasar PPs Universitas Negeri Medan. Di luar program studi kependidikan, Program Studi Ketahanan Nasional di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia pun secara terang-terangan menyatakan bahwa tujuan program studi mereka ialah menghasilkan lulusan sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi jenjang S1 dan diploma untuk mata kuliah Kewarganegaraan/ Pendidikan Kewarganegaraan (Program Pascasarjana UNY, 2014).

Tuntutan peningkatan kualitas guru dan dosen Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh wilayah Indonesia tersebut telah mendorong pendirian di PPs UNY. Ketersediaan sumber daya pendidik (dosen) di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY dipandang kompeten untuk mengelola program magister sesuai standard yang telah ditetapkan di bawah koordinasi PPs UNY. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana menjadikannya layak untuk menyelenggarakan pendidikan setingkat magister di UNY.

Di Indonesia, sampai saat ini lembaga pendidikan tinggi yang telah menyelenggarakan Program Studi S2 (dan S3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baru di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Selama ini penyelenggaraan kajian Pendidikan Kewarganegaraan setingkat jenjang magister masih menjadi konsentrasi dari Prodi PIPS atau Pendidikan Dasar di program pascasarjana ("Program Studi Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan," <http://pasca.unimed.ac.id>; "Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta," <http://pps.uny.ac.id/pendidikan-ilmu-pengetahuansosial-s2>). Karena posisinya masih menjadi konsentrasi, maka fokus kajian dan kompetensi yang diharapkan kepada peserta didik dan lulusannya pun belum memadai seperti yang diidealkan (Program Pascasarjana UNY, 2014).

C. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 Terminologi revolusi industri pertama kali dalam peradaban modern ditandai dengan kemajuan teknologi mesin melalui penemuan mesin uap pada tahun 1784 di Inggris. Pada tahap berikutnya revolusi industri kedua ditandai dengan penemuan listrik dan produksi massal pada 1870. Revolusi industri ketiga ditandai oleh pengembangan teknologi informasi dan sistem otomasi computer di dunia elektronik pada sekitar 1969.

Sekarang memasuki abad 21, masyarakat internasional tengah memasuki era revolusi industri keempat. Era terakhir ditandai oleh “cyber physical systems,” “kecerdasan artifisial”, “jaringan internet” sebagai pertukaran dan banjirnya sumber informasi. Era ini menuntut ketersediaan pendidikan yang menghasilkan lulusannya memiliki “kompetensi dengan karakter kerja masa depan” (*Kompas*, 2018). Dari aspek tersebut, meminjam kerangka Maree Gosper dan Dirk Ifenthaler (2014) maka perlu dirancang ulang paradigma, filosofi pembelajaran dan profil lulusan pendidikan magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar sejalan dengan kebutuhan pasar kerja era revolusi industri keempat tanpa meninggalkan tugas mulia sebagai pendidik nilai-nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan berdasar Pancasila.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Penelitian dilaksanakan di Yogyakarta dengan UNY sebagai simpul data.

B. Desain Penelitian

Sebagai bentuk penelitian deskriptif kualitatif, maka dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi model pengembangan kajian kelimuan dan kompetensi lulusan PPKn program magister di perguruan tinggi memasuki era revolusi industri 4.0;
2. Memotret pengalaman pengembangan kajian kelimuan dan kompetensi lulusan dalam Kurikulum PPKn program magister perguruan tinggi memasuki era revolusi industri 4.0;
3. Memetakan paradigma pengembangan kajian kelimuan dan kompetensi lulusan PPKn program magister perguruan tinggi memasuki era revolusi industri 4.0;
4. Memproduksi naskah akademik paradigma pengembangan kajian kelimuan dan kompetensi lulusan PPKn program magister perguruan tinggi yang disesuaikan dengan tuntutan profil lulusan memasuki era revolusi industri 4.0.

C. Sumber Data dan Subjek Penelitian

Sumber data penelitian ini, mengikuti klasifikasi Suharsimi Arikunto (2002), terdiri atas *paper* dan *person*. *Paper* mencakup literature-literatur/kepuustakaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data berupa *person* dapat juga disebut sebagai subjek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Secara umum teknik pengumpulan dan analisis data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu studi komparatif dokumentasi kurikulum di tiga perguruan tinggi yang ditentukan secara purposif; dan *desk study*. Studi dokumentasi meliputi kajian analitis dan FGD terhadap pengembangan kurikulum program magister PPKn di perguruan

tinggi sampel dan internal kurikulum S2 PPKn UNY dengan analisis SWOT mengacu kepada aspek relevansi dengan kebutuhan era 4.0, FGD juga dilakukan dengan *stakeholder* pengguna lulusan S2 PPKn UNY, yakni Universitas PGRI Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;; alumni S2 PPKn UNY; dan Pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI). Dokumentasi naskah Kurikulum profil lulusan program magister PPKn/PKn PPs/SPs perguruan tinggi se Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kurikulum Program Magister PPKn di Tiga Perguruan Tinggi

Sebagaimana dikemukakan di Bab III, penelitian ini berfokus dua hal. Pertama, secara eksternal memetakan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan era revolusi industri 4.0 yang dikembangkan dalam kurikulum program magister. Pemetaan terutama dari dua fokus substansi kajian yang tak terpisahkan, yakni kajian **Pancasila** dan **Kewarganegaraan**. Kedua, secara internal, belajar dari pemetaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di program magister perguruan tinggi lain, kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UNY disempurnakan sejalan dengan tuntutan era revolusi industri 4.0.

Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hingga laporan penelitian ini disajikan, tercatat ada tujuh program magister yang mengelola pendidikan kewarganegaraan. Enam program studi secara eksplisit dikenali dengan nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni di STKIP Arrahmaniyah, Depok; Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Pendidikan Indonesia menamai program magisternya dengan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.

Dari keenam program magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hanya STKIP Arrahmaniyah Depok yang berperingkat akreditasi C, sedangkan kelima perguruan tinggi lainnya berperingkat akreditasi B. Program magister Pendidikan Kewarganegaraan di UPI berperingkat akreditasi A. Secara lengkap komposisi pemeringkatan akreditasi program magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peringkat Akreditasi Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia

No	Perguruan Tinggi	SK Pendirian Program Studi, Tanggal	No. SK Akreditasi	Tahun SK Akreditasi	Peringkat Akreditasi	Tanggal Daluarsa Akreditasi
1	STKIP Arrahmaniyah, Depok	057/P/2014 27 Februari 2014	1330/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/II/2020	2020	C	-
2	Universitas Negeri Malang	399/KPT//2016 13 September 2016	2559/SK/BAN-PT/Akred/M/VI I/ 2019	2019	B	2024-07-23
3	Universitas Negeri Padang	118/KPT//2015 18 November 2015	997/SK/ BAN-PT/Akred/M/IV / 2019	2019	B	2024-04-16
4	Universitas Sebelas Maret	411/KPT//2016 14 September 2016	3106/SK/ BAN-PT/Akred/M/VI II/2019	2019	B	2024-08-20
5	Universitas Negeri Gorontalo	106/E/O/2014 19 Mei 2014	1185/SK/ BAN-PT/Akred/M/IV / 2017	2017	B	2022-04-18
6	Univesitas Negeri Yogyakarta	434/E/O/2014, 2 Oktober 2014	0004/SK/ BAN-PT/Akred/M/I/ 2016	2016	B	2021-01-11

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2019) <https://forlap.ristekdikti.go.id/prodi/search>; Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (2019). https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php diakses 29 September 2019.

Pada bagian berikut disajikan tiga profil program magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditentukan secara purposif. Rasional pemilihan ketiganya yaitu berdasarkan aspek geografis: Universitas Negeri Padang mewakili Sumatera, Universitas Negeri Gorontalo mewakili Sulawesi, dan Universitas Sebelas Maret mewakili Jawa. Secara berturut-turut disajikan program magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari masing-masing letak geografis PT tersebut.

a. Program Magister PPKn Universitas Negeri Padang

Program Magister PPKn Universitas Negeri Padang mendapat ijin pembukaan berdasar Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 118/KPT//2015, tertanggal 18 November 2015. Sebagaimana prodi-prodi lainnya, program magister ini memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Visi prodi ini yakni: “menjadi program magister terkemuka yang menghasilkan lulusan unggul, profesional, kompetitif dan berkarakter dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Kawasan Asia Tenggara di Tahun 2023.” Adapun misi yang hendak dilakukan program magister ini mencakup:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas di bidang PPKn berlandaskan riset dan berorientasi pada perkembangan IPTEK serta nilai-nilai Pancasila sebagai jatidiri bangsa.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas dan publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna penguatan profesionalisme pendidik PPKn dalam mendukung revitalisasi nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Mengembangkan keilmuan PPKn melalui penelitian, temu ilmiah lokal, nasional, dan internasional.

Pada bagian lain, Program Magister PPKn FIS Universitas Negeri Padang memiliki tujuan sebagai berikut.

“Menghasilkan lulusan yang dapat menjadi tenaga pendidik di bidang PPKn, politisi, peneliti, konsultan pemberdayaan masyarakat dan calon doktor yang;

- Kompeten, dapat diandalkan, berdaya saing tinggi dan berwawasan kebangsaan. Berkemampuan belajar sepanjang hayat, mengembangkan keilmuan PPKn dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.
- Berkemampuan melakukan analisis dalam memecahkan permasalahan pendidikan kewarganegaraan dan permasalahan kebangsaan.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi, hukum dan moral masyarakat berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Program Magister PPKn Universitas negeri Padang menjabarkannya dalam program kurikuler yang memuat kurikulum yang harus ditempuh mahasiswa. Susunan kurikulum terdiri atas kelompok matakuliah wajib, mata kuliah keahlian dan mata kuliah pilihan dan Tesis. Seluruh mahasiswa wajib menempuh beban studi 39 SKS selama empat semester. Secara rinci struktur kurikulum disajikan sebagai berikut.

Struktur Kurikulum Prodi S2 PPKn Universitas Negeri Padang

Mata Kuliah Wajib

1. Landasan Ilmu Pendidikan
2. Filsafat Ilmu
3. Statistik Terapan

Mata Kuliah Keahlian

1. Analisis Teori Pengembangan Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Analisis Teori Pendidikan Hukum dan Konstitusi
3. Analisis Teori Pendidikan Politik dan Demokrasi
4. Analisis Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PPKn
5. Metodologi Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan
6. Analisis Teori Kebangsaan dan Pembangunan
7. Studi Lapangan dan Seminar PPKn
8. Analisis Teori dan Aplikasi Pendidikan Karakter

Mata Kuliah Pilihan

1. Sejarah Kebangsaan
2. Perbandingan dan Perkembangan Ideologi
3. Konflik dan Integrasi
4. Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan
5. Isu-isu HAM dan Lingkungan
6. Analisis Gender dan Inklusi Sosial
7. Analisis Politik dan Kebijakan Pendidikan
8. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Tesis

1. Seminar Proposal Tesis
2. Seminar Hasil Tesis
3. Tesis

b. Kurikulum S2 PPKn Universitas Negeri Gorontalo

Program Magister PPKn Universitas Negeri Gorontalo mendapat ijin pembukaan berdasar Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 106/E/O/2014, tertanggal 19 Mei 2014. Sebagaimana prodi-prodi lainnya, program magister ini memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Visi prodi ini yakni: "Menjadi Program Studi yang Dapat Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Bermoral, Inovatif, dan Profesional di Bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn) untuk Menghadapi Tantangan pada Tahun 2035.” Adapun misi yang hendak dilakukan program magister ini mencakup:

1. Menyelenggarakan **Pengembangan pendidikan dan pengajaran** melalui Pendidikan Magister PPKn, guna menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bermoral, inovatif, dan profesional.
2. Menyelenggarakan **Pengembangan penelitian** yang bermutu dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guna menghasilkan kemampuan akademik yang kondusif, produktif dan kreatif.
3. Menyelenggarakan **pengabdian pada masyarakat** dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan akademik yang melibatkan **kerjasama** dengan beberapa stackholder, baik di dalam maupun luar negeri, guna melaksanakan tridharma di bidang ilmu PPKn.

Pada bagian lain, Program Magister PPKn Universitas Negeri Gorontalo memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Dihasilkannya lulusan yang bermoral, inovatif, dan profesional di wilayah regional, nasional dan internasional dalam bidang **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**.
2. Dihasilkannya **karya-karya penelitian** dalam bidang ilmu yang berkualitas dan terpublikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional yang diakui.
3. Dihasilkannya karya-karya pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat.
4. Terwujudnya **kemitraan** yang professional dan berkelanjutan baik dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri maupun dengan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tridharma di bidang ilmu PPKn.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Program Magister PPKn Universitas Negeri Gorontalo menjabarkannya dalam program kurikuler yang memuat kurikulum yang harus ditempuh mahasiswa. Susunan kurikulum terdiri atas kelompok matakuliah wajib, mata kuliah keahlian dan mata kuliah pilihan dan Tesis. Seluruh mahasiswa wajib menempuh beban studi 36 SKS selama empat semester. Secara rinci struktur kurikulum disajikan sebagai berikut.

No.	Mata Kuliah	SKS
	Semester I	2
1.	Filsafat Ilmu	3
2.	Metodologi Penelitian	2

3.	Sistem Sosial Budaya Indonesia	2
4.	Dasar Teori Pendidikan Politik	2
5.	Teori Hukum dan Ketatanegaraan	2
6.	Teori Pendidikan Nilai dalam PPKn	2
7.	Inovasi Pendidikan & Pembelajaran	2
Semester II		
1.	Prinsip Nilai Kemanusiaan dalam HAM	2
2.	Perbandingan Sistem Politik	2
3.	Seminar Pendidikan Kewarganegaraan	2
4.	Perbandingan Civic	2
5.	PPKn & Masyarakat Multikultural	3
6.	Filsafat & Demokrasi	2
7.	Landasan & Teori PPKn	2
Semester III		
1.	Tesis	3
	Jumlah	36

b. Kurikulum Program Studi S2 PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta

Program Studi S2 PPKn, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) didirikan berdasarkan Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI No. 411/KPT/2016 tertanggal 14 September 2016. Sebagaimana prodi-prodi lainnya, program magister ini memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Visi prodi ini yakni: “Menjadi pusat pengembangan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.” Adapun misi yang hendak dilakukan program magister ini mencakup:

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan model yang baru dari perkembangan kontemporer di bidang PPKn.
2. Mengadakan penelitian, kajian akademik dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang ilmu Pancasila, ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.
3. Mengadakan kegiatan pengabdian dalam bidang ilmu Pancasila, ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga akademik dan profesi pada tingkat nasional dan internasional guna menunjang pengembangan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.

Pada bagian lain, Program Magister PPKn PPs UNS memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Meluluskan magister dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mempunyai kompetensi mengimplementasikan pembelajaran di lembaga pendidikan sebagai wujud nyata Pendidikan Kewarganegaraan dimensi kurikuler.
2. Meluluskan magister dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mempunyai kompetensi penelitian sebagai wujud nyata Pendidikan Kewarganegaraan dimensi akademik.
3. Meluluskan magister dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mempunyai kompetensi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia yang cerdas dan berkarakter sebagai wujud nyata Pendidikan Kewarganegaraan dimensi kemasyarakatan.
4. Memperoleh produk-produk ilmiah dalam standar nasional dan internasional hasil dari aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bidang studi Pancasila, ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan

Setiap lulusan Program Magister PPKn PPs UNS diharapkan memiliki sejumlah kompetensi sebagai berikut.

1. Mampu menganalisis dan mengembangkan ilmu kewarganegaraan sebagai pendukung utama pendidikan kewarganegaraan.
2. Mampu menganalisis dan mengembangkan ilmu pendidikan guna menerapkan bidang pendidikan kewarganegaraan.
3. Mampu menganalisis dan mengembangkan bidang kajian yang mendukung pendidikan kewarganegaraan, yakni kajian bidang filsafat, hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya.
4. Mampu menganalisis dan mengembangkan bidang pendidikan kewarganegaraan pada dimensi kurikuler dan sosial kemasyarakatan.
5. Mampu mengembangkan program pendidikan kewarganegaraan baik dimensi kurikuler dan atau dimensi kemasyarakatan secara ilmiah, psikologis dan pedagogis.
6. Mampu mengelola program pendidikan kewarganegaraan baik dalam dimensi kurikuler, dan atau kemasyarakatan melalui pendekatan aktif.
7. Mampu melaksanakan penelitian dan kajian akademik lainnya guna memecahkan masalah atau isu kewarganegaraan melalui karya ilmiah yang dipublikasikan secara nasional maupun internasional.
8. Mampu mengelola hasil penelitian, hasil pemikiran akademik lainnya kepada masyarakat melalui publikasi akademik dan kegiatan pengabdian.

Peluang Kerja Lulusan

1. Guru bidang PPKn: pendidik tingkat mahir dengan tugas utama menyeleksi, menata, mengorganisasi, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, dan mengembangkan jaringan kerja yang baik dengan sejawat guru dan komunitas guru lain guna keberlanjutan pendidikan kewarganegaraan jalur kurikuler di sekolah.

2. Dosen bidang PPKn: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menyeleksi, menata, mengorganisasi dan mengembangkan materi pendidikan kewarganegaraan, melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, serta melaksanakan penelitian guna perbaikan mutu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.
3. Peneliti bidang PPKn: mengembangkan pemikiran yang kritis, logis, dan sistematis melalui kajian akademik bidang pendidikan kewarganegaraan, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi isu-isu bidang pendidikan kewarganegaraan melalui hasil penelitian dan dibukukan dalam suatu karya ilmiah (prosiding, jurnal, buku) yang diakui secara regional, nasional, maupun internasional.
4. Pengabdian bidang PPKn: mengkomunikasikan ide, gagasan akademik, mengembangkan, mengelola, dan memelihara jaringan kerja dengan instansi dan komunitas lain di masyarakat guna menjaga keberlanjutan pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat (*civic community*).

Kurikulum Prodi Magister PPKn Pascasarjana UNS dirancang dengan masa studi selama 4 (empat) semester, beban SKS sebanyak 44 SKS, yang terdiri atas 10 SKS Mata Kuliah Dasar (MKD), 30 SKS Mata Kuliah Keahlian Wajib (MKKW), dan 4 SKS Mata Kuliah Keahlian Pilihan (MKKP) yang wajib diambil mahasiswa dari 12 SKS yang ditawarkan. Pada setiap tahunnya mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir mata kuliah disusun sedemikian rupa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Mata Kuliah Dasar

1. Filsafat Ilmu
2. Metode Penelitian
3. Teori Kewarganegaraan
4. Hukum dan Konstitusi
5. Teori dan Landasan PPKn

Mata Kuliah Keahlian Wajib

1. Sistem Demokrasi
2. Perbandingan Hukum Kewarganegaraan
3. Kewarganegaraan Multikultural
4. PPKn Kurikuler
5. PPKn Kemasyarakatan
6. Pendidikan Moral
7. Inovasi Pendidikan
8. PPKn Perspektif Internasional
9. Pendidikan Politik
10. Tesis

Mata Kuliah Keahlian Pilihan

1. Ekonomi Pancasila

2. Etika Politik
3. Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer
4. Ekologi Kewarganegaraan
5. Perkembangan HAM
6. Kewarganegaraan Digital

B. Konstruksi Kurikulum Program S2 PPKn PPs UNY

Program Studi S2 PPKn, PPs UNY didirikan berdasarkan Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI No. 434/E/O/2014, tertanggal 2 Oktober 2014. Sebagaimana prodi-prodi lainnya, program magister ini memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Visi prodi ini yakni: “Pada Tahun 2025 menjadi program studi unggul, kreatif, dan inovatif di bidang kajian pendidikan kewarganegaraan berjatidiri Indonesia berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.” Adapun misi yang hendak dilakukan program magister ini mencakup:

1. menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif, dan inovatif sebagai ahli dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan persekolahan dan/atau kemasyarakatan;
2. menyelenggarakan keunggulan kajian akademik pendidikan kewarganegaraan berbasis penelitian dan pengembangan secara kreatif, dan inovatif;
3. mengembangkan inovasi pendidikan kewarganegaraan berbasis penelitian dan pengembangan; serta,
4. memperluas jejaring penyebaran hasil kajian pendidikan kewarganegaraan berbasis penelitian dan pengembangan.

Program Studi S2 PPKn PPs UNY memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan sebagai ahli dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan persekolahan dan/atau kemasyarakatan yang mampu:

1. mengembangkan kajian pendidikan kewarganegaraan di bidang keilmuannya dan/atau praktik profesionalnya berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi berbangsa dan bernegara;
2. memecahkan permasalahan kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melalui hasil-hasil penelitian dan pengembangan kajian untuk kepentingan akademik dan/atau profesi pendidikan kewarganegaraan baik secara interdisipliner maupun multidisipliner;
3. mengelola penelitian dan pengembangan kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, sehingga mendapat pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
4. menjalin kolegialitas dan kerjasama dalam jejaring pengembangan kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan baik di level nasional maupun internasional.

Guna mewujudkan lulusan yang handal maka Program S2 PPKn PPS UNY menyusun Capaian Pembelajaran ke dalam aspek Kompetensi Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan secara utuh. Secara rinci capaian pembelajaran dijabarkan sebagai berikut.

1. Kompetensi Sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- j. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- k. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.

2. Kompetensi Pengetahuan:

- a. menguasai teori-teori kewarganegaraan sebagai kajian multidisipliner dan interdisipliner dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan profesional;
- b. menguasai teori, konsep, serta model belajar dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai instrumen pedagogis untuk mengembangkan masyarakat kritis dan demokratis;
- c. menguasai teori, konsep dan model pengembangan program pembelajaran dan evaluasi program pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka perancangan inovasi-inovasi dalam model pembelajaran dan evaluasi program pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- d. menguasai teori, konsep dan model kajian akademik dan pembelajaran kewarganegaraan di Indonesia dalam perspektif komparatif dengan konsep dan praktik umum Pendidikan Kewarganegaraan di dunia.

3. Kompetensi Keterampilan

Khusus:

- a. mampu menghasilkan desain atau model pembelajaran baru yang inovatif dan teruji untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

- b. mampu merencanakan pemetaan penelitian dalam bidang pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;
- c. mampu melakukan analisis dan pendalaman terhadap teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- d. mampu melakukan kajian terhadap kebijakan atau implementasi kebijakan di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

Umum:

- a. mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan bidang keahlian melalui penelitian ilmiah, penciptaan kreatif tulisan serta menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis;
- b. menyusun dan mengomunikasikan ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- c. mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- d. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi;
- e. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- f. mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Setelah mengalami perbaikan, rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi S2 PPKn PPs UNY dijabarkan dalam komponen-komponen kompetensi sebagai berikut.

1. SIKAP

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

- g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- k. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.

2. PENGETAHUAN

- a. Menguasai teori-teori kewarganegaraan sebagai kajian interdisipliner dan multidisipliner dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan profesional;
- b. Menguasai teori, konsep, serta model belajar dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai instrumen pedagogis untuk mengembangkan masyarakat kritis dan demokratis;
- c. Menguasai teori, konsep dan model pengembangan program pembelajaran dan evaluasi program pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka perancangan inovasi-inovasi dalam model pembelajaran dan evaluasi program pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- d. Menguasai teori, konsep dan model program pembelajaran kewarganegaraan di Indonesia dalam perspektif komparatif dengan konsep dan praktik umum Pendidikan Kewarganegaraan di dunia.

3. KETERAMPILAN KHUSUS

- a. Mampu menghasilkan desain atau model pembelajaran baru yang inovatif dan teruji untuk pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. Mampu melakukan pemetaan penelitian dalam bidang pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;
- c. Mampu melakukan analisis dan pendalaman terhadap teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- d. Mampu melakukan kajian terhadap kebijakan atau implementasi kebijakan di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

4. KETERAMPILAN UMUM

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan bidang keahlian melalui penelitian ilmiah, penciptaan kreatif tulisan serta menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis;
- b. Mampu menyusun dan mengomunikasikan ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- c. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- d. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi;
- e. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- h. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- j. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;
- k. Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya plagiarisme;
- l. Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan
- m. Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulisan.

Pada saat usulan pembukaan Prodi S2 di UNY berjumlah total beban studi yang harus dicapai yakni 72 SKS. Beban studi tersebut di Prodi S2 PPKn PPs UNY dijabarkan dalam Tabel 2. Dari rincian Kurikulum di Tabel 2, tampak tidak logis untuk ditempuh peserta. Untuk itu Kurikulum disederhanakan menjadi 40 SKS sebagaimana dikembangkan dan digunakan sejak Tahun Akademik 2014/2015 hingga laporan penelitian ini dibuat, sebagaimana dapat dilihat di Tabel 3.

Kurikulum Prodi S2 PPKn PPs UNY dirancang dengan masa studi selama 4 (empat) semester, beban SKS sebanyak 40 SKS, yang terdiri atas Mata Kuliah Wajib PPs, Mata Kuliah Keahlian Wajib Prodi, dan Mata Kuliah Keahlian Pilihan Prodi. Pada setiap tahunnya mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir mata kuliah disusun sedemikian rupa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Tabel 2. Struktur Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Saat Usulan Pembukaan Prodi

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SEMESTER			
				1	2	3	4
A PERKULIAHAN WAJIB							
1	PAS8201	Filsafat Ilmu	2	X	-	-	-
2	PAS8302	Metode Penelitian Pendidikan	3	X	-	-	-
3	PAS8303	Statistika	3	X	-	-	-
4	PAS8048	Bahasa Inggris	0	X	-	-	-
5	PKN8201	Teori dan Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan	2	X	-	-	-
6	PKN8202	Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	X	-	-	-
7	PKN8203	Pendidikan Politik	2	-	X	-	-
8	PKN8304	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	-	X	-	-
9	PKN8205	Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Internasional	2	-	X	-	-
10	PKN8206	Filsafat Moral Pancasila	2	-	X	-	-
11	PKN8207	Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	2	-	-	X	-
12	PKN8208	Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	2	-	-	X	-
13	PKN8209	Seminar Isu Kontemporer Pendidikan Kewarganegaraan	2	-	-	X	-
				12	8	6	
				SEMESTER			
B PERKULIAHAN PILIHAN PROGRAM STUDI (Pilih 3 sks tiap semester)			sks	1	2	3	4
1	PKN8309	Pengembangan Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan	3	X	-	-	-
2	PKN8310	Identitas Nasional dan Masyarakat Multikultural	3	X	-	-	-
3	PKN8311	Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer	3	X	-	-	-
4	PKN8312	Sistem Politik dan Budaya Kewargaan	3	X	-	-	-
5	PKN8313	Manajemen Konflik	3	-	X	-	-
6	PKN8314	Sosiologi Kewarganegaraan Indonesia	3	-	X	-	-
7	PKN8315	Etika Politik Pancasila	3	-	X	-	-
8	PKN8316	Konstitusi dan Negara Hukum	3	-	X	-	-
				3	3		
				SEMESTER			
C PROPOSAL TESIS			sks	1	2	3	4
1	PAS8506	Projek Penulisan Proposal Tesis	5	-	X	-	-
					5		
				SEMESTER			
D PENELITIAN DAN PENULISAN TESIS			sks	1	2	3	4
	PAS8404	Kajian Literatur Penelitian	4	X	-	-	-
	PAS8405	Rancangan dan Pengembangan Instrumen Penelitian	4	-	X	-	-
	PAS8407	Pengumpulan dan Analisis Data	4	-	-	X	-
	PAS8411	Penulisan Tesis	4	-	-	-	X
	PAS8612	Ujian Tesis	6	-	-	-	X
				4	4	4	10
				SEMESTER			
E SEMINAR			sks	1	2	3	4
	PAS8508	Seminar Proposal Tesis	5	-	-	X	-
						5	
				SEMESTER			
F KARYA ILMIAH			sks	1	2	3	4
	PKN8517	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi	4	-	-	X	-

	PKN8518	Publikasi Karya Tulis Ilmiah Jurnal Bereputasi Internasional	4	-	-	X	-
						8	-
JUMLAH TOTAL SKS				19	20	23	10
			72				

Mata Kuliah Matrikulasi

G	PERKULIAHAN MATRIKULASI		sks	SEMESTER			
				1	2	3	4
	PKN6213	Pengantar Hukum Indonesia	2				
	PKN6236	Ilmu Kewarganegaraan	2				
	SEF6207	Dasar-dasar Ilmu Politik	2				
	PKN6252	Dasar-dasar Pendidikan Moral	2				
	PKN6237	Pendidikan Kewarganegaraan	2				
	PKN6251	Budaya Politik	2				
JUMLAH TOTAL SKS			12	0	0	0	0
			12				

Tabel 3 Revisi Struktur Kurikulum Pasca Ijin Pembukaan Prodi S2 PPKn PPs UNY

NO.	KODE	MATA KULIAH	SEMESTER DAN SKS				JUMLAH SKS
			1	2	3	4	
I. MATA KULIAH WAJIB PPs						10	
1	PAS8201	Filsafat Ilmu	2				
2	PAS8302	Metodologi Penelitian Pendidikan	3				
3	PAS8303	Statistika	3				
4	PAS8204	Bahasa Inggris	2				
II. MATA KULIAH PRODI						30	
A. Mata Kuliah Wajib							
1	PKN8201	Teori dan Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan	2				
2	PKN8202	Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan		2			
3	PKN8203	Pendidikan Politik	2				
4	PKN8204	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan		2			
5	PKN8205	Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Internasional		2			
6	PKN8206	Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan		2			
7	PKN8207	Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia		2			
8	PKN8208	Seminar Isu Kontemporer Pendidikan Kewarganegaraan			2		
9	PKN8209	Identitas Nasional dan Masyarakat Multikultural		2			
10	PKN8110	Proyek Penulisan Proposal Tesis	1				
11	PKN8211	Seminar Proposal Tesis		2			
12	PKN8612	Penelitian dan Penulisan Tesis					6
14	PKN8113	Penulisan Karya Ilmiah					1

B. Mata Kuliah Pilihan (2 SKS per semester)							4
No	Kode	Mata Kuliah					
1	PKN8214	Pengembangan Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan		2			
2	PKN8215	Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer		2			
3	PKN8216	Filsafat Pendidikan Kewarganegaraan		2			
4	PKN8217	Sistem Politik dan Budaya Kewargaan		2			
5	PKN8218	Sosiologi Kewarganegaraan Indonesia			2		
6	PKN8219	Etika Politik Pancasila			2		
7	PKN8220	Manajemen Konflik			2		
8	PKN8221	Konstitusi dan Negara Hukum			2		
Jumlah SKS			16	16	5	7	42

Seiring waktu dengan tuntutan lapangan kerja lulusan di era revolusi industri 4.0 dan misi ideal prodi pada bidang kajian Pancasila dan Kewarganegaraan di level pascasarjana, maka pada Tahun 2019 UNY mendorong pembenahan struktur kurikulum. Dari hasil FGD dan analisis komparatif dokumen Kurikulum Prodi S2 PPKn berbagai perguruan tinggi, diperoleh suatu kesepakatan sebagai berikut. Prodi S2 PPKn mengemban pengembangan analisis kajian terhadap dua substansi kajian sebagai penciri utama. Pertama, kajian Pancasila. Kedua, kajian pendidikan kewarganegaraan.

Telaah terhadap dokumen Kurikulum Prodi S2 PPKn berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa kajian Pendidikan Kewarganegaraan masih dominan, bahkan hampir sulit dijumpai secara spesifik nomenklatur yang khusus tentang Pancasila. Dari ketiga Prodi S2 PPKn yang dijadikan sampel kajian, kajian Pancasila menempati posisi marginal. Demikian pula di internal UNY, prodi S2 PPKn PPs UNY meski telah menampilkan nomenklatur Pancasila dalam kurikulumnya tetapi masih terbatas. Terbatas dalam arti jumlah dan posisinya sebagai matakuliah pilihan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Setelah memperhatikan hasil komparasi dan usulan baik alumni, dan *stakeholder* lainnya, Kurikulum Prodi S2 PPKn PPs UNY mengalami revisi. Revisi selain kepada proporsi kajian ke-Pancasila-an, juga posisi status matakuliah Pancasila yang ditempatkan sebagai Matakuliah Wajib Prodi. Selain itu, ada kesadaran dari Tim Pengembang Prodi S2 PPKn PPs UNY agar lulusannya mampu adaptif terhadap tuntutan era Revolusi Industri 4.0. Pemenuhan tuntutan dijabarkan dalam bentuk rumusan di komponen capaian pembelajaran lulusan. Penyediaan kesempatan peserta menempuh matakuliah prodi sebagai bentuk kewenangan

tambahan, menunjukkan elastisitas prodi di bawah fasilitasi PPs UNY agar mampu menyiapkan lulusan siap memenuhi kebutuhan era Revolusi Industri 4.0. Secara detail usulan perubahan Kurikulum S2 PPKn PPs UNY dapat dicermati pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengembangan Kurikulum Mengacu kepada Tuntutan Revolusi Industri 4.0

No	Kode	Mata Kuliah	Sem & SKS				Jum SKS	K/T	P	L
			1	2	3	4				
I. Mata Kuliah Pondasi Keilmuan										
1.	PPS8201	Filsafat Ilmu	2				7	2		
2.	PPS8202	Statistika	2					2		
3.	PPS8303	Metode Penelitian Pendidikan	3					2	1	
<i>Jumlah SKS Mata Kuliah Pondasi Keilmuan</i>			7	0	0	0		6	1	
II. Mata Kuliah Keahlian Program Studi										
1.	PKN8201	Teori dan Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan	2				27	2		
2.	PKN8202	Pendidikan Politik	2					2		
3.	PKN8203	Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2					2		
4.	PKN8204	Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Internasional		2						
5.	PKN8205	Praktik Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			2				2	
6.	PKN8206	Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer		2					2	
7.	PKN8207	Identitas Nasional dan Masyarakat Multikultural		2					2	
8.	PKN8208	Etika Pancasila		2						
9.	PKN8321	Penulisan dan Seminar Proposal Tesis			3				2	1
10.	PKN8222	Penulisan Artikel Jurnal			2					2
11.	PKN8623	Tesis				6				6
<i>Jumlah SKS Mata Kuliah Keahlian Prodi</i>			6	8	7	6		14	11	
III. Mata Kuliah Pilihan										
1.	PKN8209	Pengembangan Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		2			6	2		
2.	PKN8210	Evaluasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		2					2	
3.	PKN8211	Filsafat Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan		2					2	
4.	PKN8212	Sistem Politik dan Budaya Kewargaan		2					2	
5.	PKN8213	Sosiologi Kewarganegaraan Indonesia		2					2	
6.	PKN8214	Manajemen Konflik		2					2	
7.	PKN8215	Konstitusi dan Negara Hukum		2					2	
8.	PKN8216	Falsafah Pancasila dan Pilar Kebangsaan		2					2	

9.	PKN8217	Pancasila dan Civil Religion		2				2		
10.	PKN8218	Seminar Isu Kontemporer Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			2			2		
11.	PKN8219	Kajian Mandiri Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kemasyarakatan			2					2
12.	PKN8220	Kajian Mandiri Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Persekolahan			2					2
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan			0	4	2	0				
Jumlah SKS Mata Kuliah Per Semester			13	12	9	6		30	8	2
Jumlah SKS Mata Kuliah Program Studi			40							
IV. Mata Kuliah Keahlian Tambahan										
Dipilih dari mata kuliah pilihan lintas prodi di PPS UNY dengan bobot 2-4 SKS.										
V. Mata Kuliah Matrikulasi										
1.	PKN6231	Ilmu Kewarganegaraan	2					2		
2.	PKN6236	Filsafat Pancasila	2					2		
3.	PKN6339	Pendidikan Kewarganegaraan	3					3		

Keterangan:

- *) Mahasiswa diwajibkan mengambil 6 sks mata kuliah pilihan.
- ***) Mahasiswa dapat menempuh 2-4 sks mata kuliah keahlian tambahan dari prodi lain di program magister (S2) PPs UNY untuk memperkuat kompetensinya.
- ***) Mahasiswa lulusan dari prodi ilmu-ilmu murni menempuh 6 sks mata kuliah matrikulasi, dan mahasiswa lulusan dari prodi pendidikan non-PPKn cukup mengambil 2 sks mata kuliah matrikulasi.

B. Pembahasan

Kehadiran prodi-prodi PPKn di level pascasarjana perguruan tinggi Indonesia pada dekade pertama Abad 21, menunjukkan bahwa pendidikan nasional membutuhkan perluasan ruang lingkup kajian yang utuh antara kajian Pancasila dan Kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sebelumnya kajian PPKn terbatas kepada kebutuhan kurikuler persekolahan sebagaimana dicakup dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit disebut nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan saja. Kajian Pancasila menjadi tereduksi bahkan minor dalam program kurikuler di perguruan tinggi.

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung telah memelopori pembukaan Prodi S2 Pendidikan Kewarganegaraan sejak 2005. Sebagaimana nama prodinya, dalam telaah peneliti, nomenklatur kajian Pancasila sangat sulit dijumpai dalam struktur kurikulumnya. Rupanya ini yang kemudian menjadikan *common sense* di tiap-tiap prodi S2 lainnya yang sejenis, meski berlabel PPKn, namun berisi PKn semata.

Meskipun dari visi dan misi serta tujuan prodi-prodi S2 PPKn yang menjadi materi kajian komparatif penelitian ini, semuanya bersepakat tentang Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai fokus *raison d'être* hadirnya Prodi-prodi S2 PPKn, namun porsi dan posisi kajian Pancasila amat terbatas.

Pada bagian lain, kebutuhan era revolusi industri 4.0 yang harus dipenuhi oleh prodi-prodi S2 PPKn tidak tergambar secara eksplisit dalam dokumen kurikulumnya. Namun kebutuhan agar lulusan prodi-prodi S2 PPKn adaptif dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0 antara lain tampak dalam hal pemenuhan kompetensi keterampilan lulusan.

Pada bagian lain, Prodi S2 PPKn PPs UNY sebagai simpul utama penelitian ini menunjukkan dua hal penting. Secara akademik, substansi kajian Pancasila sebelum tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0 telah dikhtiarkan pemenuhannya, meski masih sebagai matakuliah pilihan prodi. Namun seiring kebutuhan era revolusi industri 4.0 dan masukkan-masukkan alumni serta stakeholder lainnya, maka porsi dan posisi kajian Pancasila mulai dikuatkan baik di matakuliah pilihan maupun wajib.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang diuraikan di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, memasuki era revolusi industri 4.0 Kurikulum PPKn di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Indonesia memiliki kesamaan nomenklatur kajian yang dominan menekankan aspek kewarganegaraan dibandingkan kajian Pancasila sebagai *core subjects* dalam sejumlah nomenklatur matakuliahnya, meskipun dalam kajian pokok dan profil lulusan yang dihasilkan hendak secara utuh menampilkan kompetensi lulusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kedua, berdasarkan hasil studi komparatif dengan berbagai prodi S2 PPKn yang menjadi sampel penelitian dan FGD dengan *stakeholder* maka dipetakan pengembangan kompetensi lulusan PPKn di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Indonesia era revolusi industri 4.0, yang menempatkan kajian Pancasila dan Kewarganegaraan dalam porsi dan posisi yang memadai.

B. SARAN

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap temuan hasil penelitian di Bab IV, maka disarankan sebagai berikut.

Pertama, pemetaan kurikulum Prodi S2 PPKn memasuki era revolusi industri 4.0 hendaknya tidak sebatas pemenuhan kesiapan secara instrumental, namun diperlukan kesiapan substansialis yang tergambar dalam penguatan dan penyeimbangan komponen kajian Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai inti materi pencapaian kompetensi lulusan. Tugas Prodi-prodi S2 PPKn dan lembaga terkait, seperti forum prodi dan asosiasi profesi semacam AP3KnI untuk mencapai kesepakatan tersebut pada fase berikutnya.

Kedua, meskipun upaya pemetaan dan penyesuaian relevansi Kurikulum Prodi S2 PPKn PPs UNY telah dilakukan dengan kaidah yang berlaku, di tengah persaingan antar prodi-prodi sejenis, maka secara internal kelembagaan perlu secara teratur dilakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu selain agar tetap relevan dengan kebutuhan revolusi industri 4.0 juga menjadikan Pancasila sebagai identitas khas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2010/2011). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: Kajian tentang Implikasi dan Strategi Implementasi KKNi. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Kompas. (2018). "Tantangan Dunia Kerja di Era Revolusi Industri 4.0", 28 September 2018.
- Kurikulum Prodi Magister PPKn PPs Universitas Negeri Gorontalo (<http://pascasarjana.ung.ac.id/index>) diakses pada 19 Oktober 2019.
- Kurikulum Prodi Magister PPKn FIS Universitas Negeri Padang (<http://s2ppkn.fis.unp.ac.id/index.php/kurikulum1>) diakses pada 19 Oktober 2019.
- Kurikulum Prodi Magister PPKn PPs Universitas Sebelas Maret, Surakarta (<https://pasca.uns.ac.id/s2ppkn/kurikulum/>) diakses pada 19 Oktober 2019.
- Maree Gosper dan Dirk Ifenthaler (eds.) (2014). Curriculum Models for the 21st Century. Springer: New York Heidelberg Dordrecht London
- Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. (2014). Usulan Pembukaan Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Program
- Samsuri, Suharno, Mukhamad Murdiono, R. Samidi dan Verbena Ayuningsih Purbasari (2018). *Paradigma Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana di Indonesia Era Reformasi*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: PPs UNY
- Samsuri. (2011). "Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia." *Cakrawala Pendidikan*. Vol. XXX, No. 2, pp. 267-281.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional